



KIS APBD Harus -Tepat Sasaran

UMBULHARJO—Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, Kamis (11/8) kemarin, meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) APBD. Ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemkot dalam mewujudkan jaminan kesehatan semesta atau *universal health care*, dengan tujuan menghapuskan hambatan finansial bagi masyarakat dalam menjangkau pelayanan yang komprehensif dan bermutu.

Peluncuran KIS yang dilakukan oleh Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Ruang Bina Balaikota itu nantinya harus tepat sasaran. "Kami berharap, penerima Kartu Indonesia Sehat, APBD ini benar-benar tepat sasaran dan tepat guna sebab telah melalui tahapan verifikasi dan pencocokan di lapangan," kata Haryadi.

Menurut dia, tanpa kesehatan yang prima masyarakat tidak bisa menikmati hidup sepenuhnya. Oleh sebab itu, perlindungan jaminan kesehatan sangat penting diberikan dari mulai bayi hingga saat lanjut usia.

"Kartu ini dijaga, jangan sampai hilang. Harapannya, warga pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) tidak perlu merasa was-was jika sakit dan harus berobat," kata Walikota.

Pada tahun ini, Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan sebanyak 60.195 jiwa pemegang KMS. Setelah dilakukan verifikasi terhadap data penerima bantuan iur (PBI) dari pemerintah pusat, masih ada sebanyak 10.213 jiwa pemegang KMS yang belum memiliki KIS.

Warga yang tercatat sebagai penerima KMS tetapi belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan tersebut yang kemudian diberi KIS dengan biaya ditanggung APBD Kota Yogyakarta sehingga warga tidak perlu lagi membayar iuran setiap bulan.

Pemerintah Kota Yogyakarta membayar iuran sebesar Rp 25.000 per bulan untuk setiap peserta BPJS Kesehatan dari keluarga pemegang KMS.

Disampaikan, sejak diberlakukannya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, saat ini seluruh masyarakat sudah dapat menikmati layanan kesehatan yang berkualitas.

Hingga akhir Maret 2016, penyelenggaraan JKN sudah berhasil memberikan perlindungan kepada 84,34 persen penduduk Kota Yogyakarta atau sebanyak 344.121 jiwa, termasuk bagi masyarakat kelompok kurang mampu atau kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Yogyakarta yang mencapai 114.647 orang.

Salah satu langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

"Pemberian KIS APBD ini adalah bukti kesungguhan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan jaminan sosial termasuk perlindungan aspek kesehatan. Dan mulai saat ini saya berharap Bapak-Ibu sekalian, agar tidak ragu lagi saat berkunjung ke pusat layanan kesehatan sebab sudah dijamin dan dilindungi oleh pemerintah," kata Haryadi.

Diyakini langkah ini akan mempercepat peningkatan cakupan JKN secara keseluruhan guna mewujudkan kesehatan semesta bagi masyarakat. Integrasi layanan Jamkesda ke JKN melalui BPJS Kesehatan harus dilakukan mengingat peserta program Jamkesda hanya mendapatkan keuntungan ketika berada di daerahnya sendiri, dan sebagai peserta BPJS Kesehatan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.

"Mudah-mudahan Kartu KIS ini dapat digunakan Bapak-Ibu dengan sebaik-baiknya dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat Kota Yogyakarta. Kami terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dengan seluruh *stakeholder* terkait sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta mampu menjawab keluhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang saat ini semakin kompleks," jelas Walikota.

Dia optimis, dengan upaya tersebut pihaknya akan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diimbangi dengan penguatan fasilitas kesehatan tingkat primer di Puskesmas.

Terlebih lagi saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta juga memiliki RS Pratama yang memiliki peran, fungsi dan tugas pelayanan kesehatan pada kelompok masyarakat pra sejahtera.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Hadi Mohhar, SE menambahkan bagi warga miskin yang tidak mampu, iurannya ditanggung Pemerintah. Kelompok tersebut dinamakan Penerima Bantuan Iuran (PBI), di kota Yogyakarta jumlahnya mencapai 114.647 orang.

Para penerima bantuan tersebut berhak memperoleh pelayanan kesehatan di semua faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, termasuk bila perlu rawat inap di kamar kelas III.

Daftar PBI akan ditinjau setiap 6 bulan sekali untuk memastikan ketepatan sasaran penerima.

"Data kami, *mapping* Keperawatan JKN/BPJS sampai dengan 2016 adalah PBI APBN/ Jamkesmas 114.647, Non PBI sebanyak 233.575, total peserta 348.222 atau 85,34 persen penduduk Kota. Sedangkan Data Kemiskinan Kota Yogyakarta penerima KMS sejumlah 60.195 jiwa dengan kepastian jaminan Kesehatan, KMS Peserta PBI APBN/ Jamkesmas KIS adalah 38.856. 5961 merupakan Peserta Non PBI atau Mandiri/ Pekerja upah. Jumlah yang telah memiliki Jamkesda (Jamkesos) sebesar 3.128. 71 orang telah memiliki Jamkesmas (Jamkesos), dan 4.966 diusulkan penganti Jamkesda (Jamkesos) serta Peserta PBI APBD Kota Yogyakarta per Juli 2016 sebanyak 10.213," paparnya. (**/ila/age*)

Tindak Lanjut

☐ Untuk Ditanggapi

☒ Untuk Diketahui

☐ Jumpa Pers

Yogyakarta, Kepala

✓ Dinsosnakertrans

✓ Positif

✓ Biasa

Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690720 199603 1 005



KIS APBD – Walikota Haryadi Suyuti secara simbolis menyerahkan KIS APBD di Balaikota, Kamis (11/8) kemarin. Ini merupakan bukti kesungguhan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan jaminan sosial termasuk perlindungan aspek kesehatan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005